
Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

^{1,2}Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

Email : hilalramdhani@unsil.ac.id¹, subhanagung@unsil.ac.id²

Abstract

The public image was built to give rise to the likes of the Tasikmalaya constituents which gave rise to being called a Kyai party, Islamic boarding school party, movement/preaching party. This image has a connection with the socio-cultural culture of the Tasikmalaya people, which incidentally is strongly associated with Islamic culture. This research uses a qualitative approach with a case study method that investigates contemporary phenomena in real life contexts. In this research the focus is on research on political imagery in the institutionalization of the United Development Party. The results of the research show an imaging model that develops an imaging model of the four main cells of Tasikmalaya's political power, namely the image of the Charismatic Ulama party, the Nahdiyyin Party, the Mass Organization Party and the Dakwah Party. Among these four images, the most reliable one is that PPP is a party that is strongly supported by charismatic ulama, where in the Tasikmalaya context charismatic ulama have political power as political actors who are liked and followed by the public. By developing a model of imaging the charisma of Mained Ulama as a strong and influential actor in Tasikmalaya, PPP can develop rapidly and because it is able to become a leader in the PPP executive and legislative institutions, it becomes a benchmark for the survival of political parties in Tasikmalaya.

Keywords: Political Imaging, Institutionalization, Partai Persatuan Pembangunan.

Abstrak

Citra publik dibangun untuk melahirkan kesukaan konstituen Tasikmalaya yang melahirkan penyebutan sebagai partai kyai, partai pesantren, partai gerakan/dakwah. Citra ini memiliki pertautan dengan sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene kental dengan kultur ke-Islaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dalam penelitian ini fokus pada penelitian pencitraan politik dalam institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama kekuatan politik Tasikmalaya, yakni mencitrakan sebagainya partainya Ulama Kharismatik, Partai Nahdiyyin, Partai Ormas dan Partai Dakwah. Diantara keempat pencitraan tersebut yang sangat diandalkan adalah PPP merupakan partai yang didukung kuat oleh para Ulama Kharismatik, dimana dalam konteks Tasikmalaya ulama kharisatik memiliki kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model pencitraan Kharisma Ulama *Mained* sebagai aktor orang kuat dan berpengaruh di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi *leader* dalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.

Kata kunci: pencitraan politik, PPP Tasikmalaya.

I. Pendahuluan

Kajian mengenai pembangunan citra positif (*reification*) banyak dilakukan sesuai dengan perkembangan Partai Persatuan Pembangunan—selanjutnya ditulis PPP—yang semakin pesat pasca tuntuhnya Rezim Soeharto (Orde Baru) di Tasikmalaya. Di mana sebelumnya partai ini hanyalah sebagai partai “gurem” mengalami kesulitan dalam perkembangannya karena tekanan dari penguasa.

Terdapat beberapa hal menarik yang mewarnai dinamika politik Tasikmalaya, salah satunya adalah di mana PPP tampil sebagai dominasi baru dalam panggung politik lokal di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Eksistensi PPP di daerah Tasikmalaya secara konsisten utamanya setelah bergulirnya Era Reformasi dimulai dengan hasil mampu mengungguli berbagai kontestasi pemilihan (Pemilu) sepanjang waktu tersebut. Keunggulan demi keunggulan dalam berbagai kontestasi tersebut menghantarkan PPP di daerah ini berhasil bertahan dan berkembang dalam dinamika perpolitikan lokal Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa dalam perkembangannya PPP Tasikmalaya mampu bertransformasi dari partai “pelengkap penderita” di Masa Rezim Orde Baru kemudian menjadi partai yang memiliki pengaruh besar di Tasikmalaya. Tentu perkembangan tersebut tidaklah berjalan begitu saja, namun melalui proses survivalitas yang panjang dan penuh perjuangan serta konsistensi dalam mengelola dan membangun citra positif partai di mata konstituen. Survivalitas tersebut tentunya diwarnai dengan dinamika naik-turun kondisi partai, baik yang mengarah kepada situasi yang kondusif bagi partai, maupun kondisi yang dapat melemahkan partai.

Maksud dari penyebutan partai yang mampu *survive* dalam studi ini meliputi dua hal utama, yakni : *pertama*, secara internal partai mampu mengelola segala daya *independenitas* partai sehingga mampu mengelola rumah tangga, melakukan fungsi kepartaian dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. *Kedua*, secara eksternal partai dapat merespon berbagai perubahan situasi sosial-politik dan mampu berkontestasi dalam pemilihan jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat, baik pimpinan eksekutif maupun legislatif dan dapat memberikan pembelajaran politik baik bagi kader, maupun masyarakat luas.

Kajian teoritis yang akan digunakan dalam menggambarkan *reification* partai Golkar ini adalah bersumber dari kajiannya Randall dan Svasand (2002). Dua pemikir ini sebelumnya melihat dari kajian-kajian institusionalisasi kepartaian Huntington (1968) menggunakan istilah-istilah yang dipakai dalam bentuk kajian metriks. Model tersebut digunakan untuk mengkaji institusionalisasi kepartaian di Dunia Ketiga semisal Argentina, Malaysia termasuk Indonesia. Model metriks Randall dan Svasand juga digunakan Akbar Tandjung (2007) sebagai kerangka teoritik dalam membaca institusionalisasi Partai Golkar pasca jatuhnya Soeharto dan juga yang terbaru dipakai oleh Tomsa yang juga sama untuk membaca institusionalisasi Partai Golkar Pasca Soeharto (Tomsa, 2008).

Pelembagaan partai politik dalam Randall dan Svasand (2002) adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu; *pertama*, dimensi kesisteman

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

(*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. *Keempat*, dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.

Tabel 1. Metriks Dimensi-Dimensi dari Institusionalisasi Kepartaian

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Kultural	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Sumber: Randall dan Svasand (2002)

Pertama, dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. *Kedua*, dimensi identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau *platform* partai dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). *Keempat*, dimensi pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik dan bagaimana pihak lain menyesuaikan dengan visi-misinya (Randall & Svasand, 2002).

Dari tulisan di atas, terpetakanlah dalam ranah mana penulis memfokuskan kajian, yakni memfokuskan pada salah satu dimensi pelembagaan partai politik yaitu pembangunan citra partai politik (*reification*). Hal inilah yang akan dikaji kemudian dalam konteks Partai Golkar masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Kajian dimensi yang lain jika ada hanya sebagai pelengkap argumen, jika hal tersebut berkaitan dengan citra partai ke publik. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada dasarnya metriks Randall dan Svasand ini *include* antara satu dimensi dengan dimensi lainnya.

Sebagaimana dibahas di atas, *reification* merupakan salah satu dimensi dalam kajian institusionalisasi kepartaian (Ridha, 2016; Rachmayani & Warganegara, 2023; Ivanny, 2023). *Reification* maksudnya adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya (Kaypama, 2019; Lutfi, 2013). Selain itu juga bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa *impact* positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya.

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik (Susanto, 2019; Nurdin, 2013; Putra, 2019). Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Suryana, Ardiansyah & Manan, 2020; Goraph, & Lopak, 2018; Wanto, 2021; Muhammad, 2018). Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut. Konsep citra terkait dengan imajinasi publik terhadap partai tertentu yang berdasar dari fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Dalam konteks ini reifikasi akan banyak bicara politik simbol yang dimainkan partai, *flat-form* partai yang populis dan implementasi *flat-form* yang masif.

Secara empiris terdapat berbagai penelitian yang mengkaji pencitraan partai politik, Muchtar (2016) menyatakan Partai politik Golkar menerapkan model pencitraannya melalui beberapa cara, seperti, Pertama, pengusulan motto “Partai Idea” bertujuan untuk menampilkan Golkar sebagai partai progresif yang terlibat dalam kompetisi ide-ide beragam dan inovatif yang diusungnya. anggota. Golkar bertujuan untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai partai politik dalam menjadi penampung konsep-konsep inovatif demi kemajuan negara kita. Selain itu, untuk menumbuhkan citra partai yang berorientasi global, Golkar melakukan tur internasional untuk berinteraksi dengan para pemimpin partai dan pejabat negara. Selain itu, pidato politik juga menjadi peluang untuk meningkatkan nama baik partai dan pemimpinya dengan menyebarkan pemikiran dan gagasan Golkar terkini melalui orasi yang disampaikan oleh ketua umum. Selain itu, dalam upaya meningkatkan reputasinya, Golkar juga aktif terlibat di beberapa sektor untuk mewujudkan tujuannya. Golkar menggunakan tiga wahana untuk mewujudkan kehadirannya: di dalam parlemen, di pemerintahan, dan di dalam Partai Golkar itu sendiri. Ketiga alat ini saja sudah cukup bagi Golkar untuk menumbuhkan persepsi positif terhadap partai, tergantung pada kemampuan Golkar dalam memanfaatkannya.

Nurussa’adah (2019) menyatakan media dan jurnalis SKH (Surat Kabar Harian) Republika telah mengembangkan gambaran yang baik ketika meliput partai-partai Islam. Arsitektur ini mengilhami setiap wacana yang diciptakan SKH Republika dengan konotasi positif, meliputi Struktur Makro, Superstruktur, dan Struktur Mikro wacana. Tujuannya untuk meningkatkan persepsi positif terhadap partai-partai Islam dengan menyebarkan berita tentang mereka. Media dan jurnalis SKH Tempo melakukan dialog dengan mengedepankan kritik sosial. Media dan jurnalis SKH Tempo mengamati peristiwa tersebut secara adil dan tidak memihak, serta melakukan pengawasan terhadap faksi dominan. Memang secara khas menunjukkan karakteristik yang kurang baik jika diamati pada Struktur Makro, Superstruktur, dan Struktur Mikro yang dihasilkan oleh SKH Tempo.

Fahrianoor (2020) menyatakan strategi pencitraan Partai Demokrat pada pemilu 2019 adalah efektif menangani persoalan politik. Partai Demokrat menggunakan jasa konsultan politik sebagai bagian dari strategi pencitraannya, khususnya untuk menyusun program kampanye partai politik tersebut. Strategi pencitraan Partai Demokrat dilaksanakan melalui media arus utama. Partai Demokrat harus menjaga konsistensi dalam menyikapi persoalan politik. Untuk menumbuhkan persepsi positif masyarakat, Partai Demokrat Kota Banjarmasin sebaiknya memilih mempekerjakan

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

konsultan politik yang terampil. Ketika menggunakan media massa, cara yang paling efektif adalah dengan memberikan akses kepada semua pejabat partai, daripada membatasi akses hanya kepada pimpinan partai saja.

Khatami (2021) menyatakan kemunculan “Baliho 2024” yang menampilkan empat tokoh politik terkemuka, yakni Puan Maharani, Airlangga Hartanto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar, banyak menuai emosi kurang baik dalam pembahasan berita Kompas.com dan Tempo.com, serta perbincangan tentang Twitter. Narasi sentimen positif dan netral juga memperlihatkan proporsi perkembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan sentimen negatif. Komunikasi dan pencitraan politik yang dilakukan keempat oknum tersebut berujung pada peningkatan elektabilitas, meski sikap kurang baik muncul. Hasil elektabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh mood yang diungkapkan dalam debat online, namun juga oleh demografi pemilih tertentu yang menjadi target para tokoh politik.

Azhar (2016) kajian terhadap pencitraan politik yang dilakukan DPD PAN Labuhan Batu Selatan pada tahun 2009-2014 menghasilkan temuan sebagai berikut: Partai Amanat Nasional (PAN) menggunakan pendekatan komunikasi politik yang sangat strategis dalam kampanye pemilu di Labuhan Selatan. Batu dari tahun 2009 hingga 2014. Bervariasi. Tujuan dari gambar tersebut adalah untuk membangkitkan empati masyarakat, sehingga memperkuat kelayakan elektoral suara PAN. Selain itu, beragamnya pemanfaatan beberapa platform komunikasi dan perangkat lunak produktivitas telah secara efektif menarik minat masyarakat umum. Dukungan terhadap PAN datang dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan tokoh maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, DPD PAN Labuhan Batu Selatan melakukan beberapa model pencitraan politik, antara lain komunikasi massa, pemanfaatan media komunikasi kelompok, dan komunikasi luar ruangan. Model pencitraan politik ini telah mencapai kesuksesan. Hal ini terlihat dari perolehan kursi PAN Labuhan Batu Selatan yang meningkat dari 1 menjadi 11 kursi.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji model pencitraan dalam partai politik yang mana pada masa ini elektabilitas yang berbasis pada pencitraan partai politik menjadi aspek penting dalam upaya partai politik melewati ambang batas parlemen. Kesalahan partai politik dalam membuat citra politik berdampak pada popularitas dan elektabilitas partai politik yang menurun.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam menjelaskan model pencitraan Partai Persatuan Pembangunan secara spesifik di Tasikmalaya. Spesifikas atas objek penelitian mampu memberikan penjelasan lebih elaboratif atas kasus yang diteliti. Dari latar belakang di atas, dengan fokus waktu penelitian tahun 2014 sampai tahun 2020, maka perumusan masalah dari kajian ini adalah bagaimanakah institusionalisasi kepartaian, khususnya pembangunan citra positif yang senantiasa dijalankan oleh PPP Tasikmalaya sehingga mampu berkembang pesat, baik sebagai tolok ukur pengorganisasian kepartaian, maupun mampu berkontestasi dalam berbagai pemilihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Narbuko dan Achmadi (2007) mendefinisikan analisis kasus sebagai penyelidikan menyeluruh terhadap suatu kasus yang menghasilkan temuan yang terstruktur dengan baik. Analisis kasus berfokus pada penciptaan kasus studi yang unik dan terdefinisi secara sempit yang berkaitan dengan

unit tertentu. Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji pencitraan PPP di internal kepartaian. Penelitian ini dilakukan di PPP Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan berbagai partisipan terkait. Model analisis Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga bagian - reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas dilakukan secara konsisten sepanjang proses penelitian untuk menilai validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikaji beberapa hal penting yang nantinya menjadi sub bab-sub bab dalam menjawab perumusan masalah yang menyangkut pembangunan citra publik yang dilakukan oleh PPP Tasikmalaya sesuai dengan turunan Visi Misi dan Program perjuangan partai supaya mampu dikenali oleh masyarakat umum atau masyarakat konstituen. Yang dimaksud dengan pembangunan citra publik dalam kajian ini adalah bagaimana partai membuat citra yang baik dihadapan konstituen partai, bahkan masyarakat secara umum sehingga disukai dan mampu terinternalisasi dalam publik sebagai partai Islam terdepan yang merepresentasikan perjuangan dari tujuan *Islam rahmatan lil alamiin*.

Pembangunan citra publik tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai upaya seperti model komunikasi dan penyebaran informasi dalam pengenalan tujuan dan program partai, pencitraan dalam wujud kegiatan dan pelaksanaan program yang menguatkan brand (kemasan) partai. Sub bab yang akan dipaparkan dalam bab ini diantaranya: (1) citra partai yang ingin dibangun, (2) strategi dalam membangun citra partai (3). *Impact* pencitraan partai terhadap keberlangsungan (survivalitas) PPP Tasikmalaya.

A. Pencitraan Politik (*Reification*) PPP Tasikmalaya

Sebagai partai yang berasaskan Islam, hal yang paling utama ingin dibangun oleh PPP Tasikmalaya adalah tentunya partai terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi segenap manusia dan alam (*Islam rahmatan lil 'alamiin*) melalui perjuangan politik-kenegaraan dalam mengatasi masalah kehidupan kemanusiaan, bangsa, agama dan negara.

Mengenai citra yang ingin dibangun oleh PPP Tasikmalaya, salah seorang informan KH. Asop Sopiudin menyatakan bahwa jika berbicara citra partai, maka PPP Tasikmalaya jelas selalu mencitrakan sebagai partai Islam terdepan, karena memang yang diperjuangkan oleh PPP adalah perbaikan kehidupan bangsa dan negara dengan mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman yang humanis dan rahmat bagi seluruh alam. PPP menginginkan menjadi bagian penting dalam kehidupan politik dengan menggunakan cara-cara politik yang baik untuk mencapai kehidupan bangsa Indonesia yang bermartabat, maju dan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Jadi PPP menginginkan nilai-nilai Islam yang luhur tersebut mampu diejawantahkan dalam kehidupan politik praktis.

Oleh karena itu, supaya masyarakat mengetahui perjuangan luhur tersebut maka perlu disebarluarkan, diinformasikan dan juga dikampanyekan program perjuangan partai baik dalam kegiatan-kegiatan formal partai maupun informal, baik dalam legislatif, eksekutif maupun di luar pemerintahan. Kampanye-kampanye politik juga dapat dilakukan untuk memasifkan ide-ide gerakan politik dan kebangsaan yang dilakukan oleh PPP dan PPP Tasikmalaya secara khusus. Asop Sopiudin menyebut

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

bahwa sebagai bukti terhadap upaya pencitraan tersebut misalnya PPP Tasikmalaya selalu menjadi pioneer dalam pembuatan regulasi yang memiliki pertautan dengan perjuangan ke-Islaman seperti Perda Tata Nilai, Perda Minuman keras (Miras), dukungan terhadap pemberdayaan pesantren yang ke depannya mendorong pembentukan Perda Pesantren, desakan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin menerbitkan Sertifikat Wakap untuk Mesjid dan Pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa hal lainnya yang menjadi *concern* PPP kedepan yang tentunya merupakan pengejawantahan dari orientasi nilai-nilai ke-Islaman tersebut.

Menurut pandangan informan H. Afip Ipan Permadi (wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PPP. Ideologi kepartaian PPP Tasikmalaya telah dipaparkan bahwa PPP Tasikmalaya sebagai bagian dari PPP secara umum dan sesuai dengan AD/ART menginginkan tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik praktis di Indonesia. Politik seharusnya dilandasi nilai-nilai keber-Islaman sehingga bermanfaat bagi umat Islam maupun kehidupan manusia pada umumnya. Namun PPP tidak berupaya menyeragamkan nilai-nilai Islam seperti apa yang dikehendaki terdapat pada setiap kader PPP. Sebagai organisasi politik yang berasaskan Islam, PPP Tasikmalaya membebaskan pemahaman keber-Islaman yang dipahami dan dipercayai oleh kader-kadernya. Yang terpenting adalah Islam yang dipahami dan dianut memiliki dasar argumentasi dan manhaj yang jelas dan tidak menyesatkan sesuai dengan tujuan luhur PPP yang merupakan gabungan berbagai organisasi Islam.

Mengenai model pencitraan PPP Tasikmalaya terdapat hal yang menarik yang disampaikan oleh salah satu informan. Menurut informan Asop Sopiudin, PPP Tasikmalaya mengembangkan 3 (tiga) hal penting terkait mencitrakan diri sebagai partai Islam inklusif dan dimiliki khalayak umat Islam khususnya di Tasikmalaya, yakni:

Pertama, PPP memiliki citra sebagai partainya umat Islam Tasikmalaya multi organisasi. Maksudnya semua organisasi ke-Islaman, baik yang kuantitasnya besar maupun kecil dapat nyaman bergabung dan melabuhkan aspirasinya di PPP, karena PPP memang partainya umat Islam dan hal ini merupakan esensi dari selogan Rumah Besar Umat Islam Indonesia, bukan partai yang berafiliasi dengan salah satu organisasi tertentu seperti beberapa partai Islam lainnya, seperti dapat disebutkan dalam hal ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki afiliasi dengan Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki kelekatan dengan Nahdatul Ulama (NU). Kalau PPP didalamnya tergabung dari berbagai organisasi termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, Al-irsyad, PUI, dan Ormas Islam lainnya.

Kedua, dalam perkaderan PPP, tidak dikenal istilah “darah biru” partai, sehingga semua kader yang memiliki potensi dan bekerja keras ingin maju difasilitasi tanpa ada pembedaan perhatian, loncat karir dan diskriminasi di PPP Tasikmalaya. Dalam partai Islam lainnya nuansa model “darah biru” disadari ataupun tidak dirasakan sangat kental seperti misalnya kemudahan dan akses informasi partai lebih dirasakan jika kader tersebut merupakan putra kyai besar pemimpin Ormas yang berafiliasi dengan partai, putra pimpinan Ponpes tertentu misalnya. Hal lainnya juga misalnya kader tersebut merupakan pengurus Ormas atau petinggi Muhammadiyah akan mendapat akses yang cepat dalam perkaderan seperti partai Amanat Nasional (PAN).

Informan Asop Sopiudin menyampaikan bahwa imej tersebut sangat populer sebagai citra PPP yang lebih masuk ke semua kalangan Islam dan kalangan kelas sosial tertentu. Sebagai contoh dia mengilustrasikan bahwa dia sendiri merupakan kader PPP yang lahir dari nol, dan bukan kalangan “darah biru” pesantren. Orang tua bukanlah

kalangan kyai yang memiliki pesantren dan kalangan darah biru Ormas tertentu. Kalau pun saat ini dia memiliki pesantren dan pimpinan yayasan sebuah lembaga pendidikan, hal itu dibangunnya setelah ia mampu menjadi bagian elit partai PPP Tasikmalaya yang dibangunnya puluhan tahun silam. Dia mengakui bahwa sebagai orang biasa dia merasa tidak dibeda-bedakan oleh para elit dan pengurus partai saat itu, karena memang diakuinya PPP Tasikmalaya tidak memberlakukan diskriminasi perkaderan.

Perkaderan yang berlaku di PPP Tasikmalaya lebih partisipatif dan melalui model perkaeran yang seperti ini mampu menaikkan kelas sosial lapisan bawah seperti dirinya menjadi kelas menengah ke atas. Asop Sopiudin memang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tiga periode dan menjadi pemimpin yayasan Daarul Abroor, Cisayong Tasikmalaya yang membawahi lembaga pendidikan pesantren, pendidikan formal dasar hingga menengah atas yang memiliki santri dan murid mencapai ratusan hingga ribuan orang. Dapat dikatakan tokoh ini berasal dari kalangan non-elit partai yang berjuang dari nol dan dikader oleh tokoh-tokoh penting PPP Tasikmalaya seperti Tatang Farhanul Hakim dan lainnya sehingga saat ini menjelma menjadi salah satu elit PPP Tasikmalaya yang disegani dan populer.

Ketiga, PPP mengembangkan model pencitraan sebagai Mitra Pesantren-Ormas (Jaringan Pesantren-Ormas), artinya PPP mencitrakan diri sebagai mitra pesantren dalam pengembangan dan jaringan dakwah Islam, khususnya di bidang politik di Tasikmalaya. Ini juga berarti bahwa PPP bukanlah *underbouw* salah satu Ormas atau Pesantren di Tasikmalaya, begitu juga sebaliknya pesantren dan Ormas bukanlah lembaga kantong PPP melainkan bekerja sama sesuai fungsi masing-masing. PPP dapat masuk ke seluruh pesantren di Tasikmalaya yang dikenal berpengaruh dan memiliki santri ribuan orang. Dalam konteks ini misalnya PPP bisa dekat dan masuk dengan tokoh-tokoh pesantren seperti Ponpes Sukahideng, Ponpes KH. Mustofa Sukamanah, Ponpes Pasir Bokor, Cintawana, Ponpes Persis Benda, Cipasung, Cilendek, Paseh, Bahrul Ulum Cibereum, Ponpes Cintapada Kota Tasikmalaya, Ponpes Condong, Haurkoneng Mandalaguna Salopa, Pager Ageung, Ihya AssSunah, Miftahul Huda Manonjaya dan sederat pesantren lainnya baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.

Di semua pesantren tersebut tersebar kader-kader yang secara structural juga merupakan pengurus dari tingkat kecamatan hingga nasional dan memiliki kedekatan dengan partai. Pesantren-pesantren tersebut juga memiliki orientasi ke-Ormasan yang berbeda-beda dari mulai NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, DMI, Al-Irsyad, dan lainnya sehingga menjadikan PPP secara kultural juga memiliki kedekatan dengan semua Ormas dan dapat masuk ke jaringan Ormas-Ormas tersebut (dari yang moderat hingga yang berorientasi kanan/fundamental). Imej inilah menjadi keuntungan bagi PPP yang tidak gamang dalam membangun hubungan baik dan dapat berada di berbagai Ormas dan pesantren yang ada di Tasikmalaya. Hal ini tentunya berbeda dengan partai lain yang memiliki stempel dekat atau bagian dari Ormas tertentu yang biasanya terbatas dalam membangun jaringan di pesantren yang setipe dengan nya.

Untuk membangun keutuhan informasi mengenai pencitraan PPP digali juga informasi dari tokoh PPP lainnya dari Kota Tasikmalaya yakni Agus Wahyudin (Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi-PPP). Menurut informan H. Agus Wahyudin bahwa citra yang ingin dibangun oleh PPP adalah sebagai partai Islam modernis yang selalu dinamis terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya sebagai bukti citra yang ingin dibangun tersebut misalnya terdapat dalam AD/ART PPP itu sendiri. Dalam muqodimmah AD/ART sebenarnya sudah jelas

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

bahwa PPP lebih mengedepankan Islam pertengahan (*Islam wasaton*) yang merangkul semua model keber-Islaman. Hal ini tentunya sesuai dan sejalan dengan sejarah dan cita-cita PPP yang merupakan fusi dari berbagai aliran ke-Islaman *ahlussunah waljamaah*.

Hal ini tentunya belum sepenuhnya tercapai dalam pencitraan PPP Tasikmalaya yang saat ini merangkak untuk membenahi diri ke arah partai yang modern sebagaimana disebutkan di atas. Namun PPP memiliki modal besar berupaya keunggulan partai yang sesungguhnya diuntungkan dengan model sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene menyukai model ideologi partai yang dibangun oleh PPP. Internalisasi PPP di Tasikmalaya relatif baik dengan konstituen tetap yang bertahan dari waktu ke waktu apapun gejala politiknya. Paling tidak hal ini dibuktikan oleh sejarah panjang PPP yang eksis berpuluh-puluh tahun dan bahkan dalam dua dekade ini bisa dikatakan menjadi tolok ukur kiprah kepartaian di Tasikmalaya.

Selain itu informan Agus Wahyudin juga menyampaikan tantangan kelemahan PPP untuk membentuk partai yang modern tersebut adalah partai ini masih belum terorganisir dengan baik. Faktanya partai ini masih menjalankan model pencitraan yang *taken for granted* apa adanya, tidak menunjukkan wujud dan aktivitas sebagai partai di masa modern yang memiliki berbagai peluang dalam memasarkan partai. Dalam model persaingan liberalisasi politik masa kini, apalagi dalam kontestasi Pemilu dan Pemilukada langsung saat ini, yang cenderung mengedepankan politik uang, klik politik yang curang dan mengedepankan kepemilikan modal materi dibandingkan modal sosial dan kemampuan *indegenuositas* kader (calon), PPP memang harus memiliki strategi pencitraan yang mampu meredam hal itu supaya tidak masuk dalam pusaran *money centric mechanism*, namun juga harus mampu menyesuaikan diri dengan model zaman saat ini dengan memanfaatkan media dan teknologi yang efektif untuk melakukan pencitraan yang mencerdaskan konstituen.

Menurut Cecep N. Yakin PPP sebagai satu-satunya partai yang berasas Islam berani dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai partai yang ingin membumikan nilai-nilai kebaikan Islam dalam politik. Perjuangan politik merupakan perjuangan yang mulia karena perjuangan yang menyangkut nasib banyak rakyat, masyarakat, bangsa. Jika politik tidak diluruskan oleh kebaikan nilai-nilai Islam, maka pada gilirannya politik menjadi arena yang sangat buruk dan dapat menyengsarakan rakyat. Oleh karena itulah, PPP secara tegas sebagai partainya umat Islam yang menghendaki kebaikan untuk semua (*rahmatan lil 'alamiin*). Menurutnya juga upaya yang paling utama dalam menderivasikan pencitraan sebagai partai Islam adalah partai itu sendiri harus dekat dengan Islam. Para elitnya harus menyatu dengan umat Islam. Representasi umat Islam adalah ulamanya, dan Tasikmalaya sangat mematuhi ulamanya. Ini makanya jawaban mengapa PPP Tasikmalaya dapat eksis dan berkembang pesat karena dekat dengan ulama.

B. Strategi Pencitraan Partai

Pencitraan yang dilakukan oleh PPP Tasikmalaya sebenarnya tidak ada yang aneh dan kenyataannya hamper serupa dengan partai-partai lainnya di Tasikmalaya. Selain melalui kampanye-kampanye politik, pencitraan dilakukan melalui media-media konvensional seperti baligho dan selebaran lainnya. PPP memang belum secara serius menggarap model yang saat ini *booming* yakni melalui media-media internet seperti sosial media, informasi melalui *web site* dan lainnya.

Bahkan menurut H. Agus Wahyudin (informan elit PPP Kota Tasikmalaya) *web site* PPP masih sangat menyedihkan, informasi tidak sistematis dan tidak dapat memberikan info yang menyeluruh mengenai arah perjuangan, kegiatan apalagi mengenai pencitraan yang dibangun. Disitulah kelemahan PPP ketika berbicara sebagai partai modern. Pengarsipan PPP sangat lemah, jangankan *online* yang *offline* saja sangat menghawatirkan catatan-catatan penting mengenai sejarah, risalah-risalah penting juga tidak dapat dijumpai dalam kepustakaan PPP Tasikmalaya.

Artinya dalam banyak hal PPP belum dapat secara efektif memanfaatkan wahana-wahana yang kompatibel dengan zona digital yang mulai digemari saat ini. Model pencitraan pun masih bersifat personal masing-masing kader seperti ketika mau pemilihan umum. Model-model konvensional yang saat ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan dan tidak efektif, karena tidak menyentuh pendukung yang mulai melek internet. Liberalisasi politik lewat pemilihan umum langsung memang mengharuskan partai politik, termasuk PPP harus kreatif dalam membuka wahana seperti aplikasi yang mampu mendekatkan informasi mengenai partai politik ke konstituen melalui tayangan yang dapat dilihat kapan saja lewat genggam tangan. Hal ini yang diakui oleh informan Agus Wahyudin PPP Tasikmalaya masih sangat lemah. Namun tentunya ke depan akan terus dikembangkan supaya PPP tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Terdapat hal menarik terkait dengan pencitraan PPP di Tasikmalaya menurut H. Agus Wahyudin, dimana model ke-Islaman Kota Tasikmalaya ini sangat unik, di mana dalam banyak hal Tasikmalaya ini dominan ber-ormas Nahdatul Ulama yang memiliki tipikal ke-Islaman moderat, namun dalam perilaku ke-Islaman warga Tasikmalaya dalam banyak hal memiliki kecenderungan ke arah kanan (cenderung fundamen/keras) dalam merespon beberapa fenomena kemungkaran yang muncul.

Selain itu juga ketika PPP mengusung isu-isu atau dukungan terhadap mode keber-Islaman yang “keras” tersebut tren suara PPP di Tasikmalaya cenderung naik seperti misalnya dalam Pemilu tahun 2014. Skenario ketika mengusung model Islam kemoderatan sebagaimana desakan dari PPP secara umum tren suara dalam Pemilu justru menurun, seperti terjadi dalam Pemilu tahun 2019 kemarin yang menempatkan PPP di urutan kedua setelah partai Gerindra yang memang pada saat itu mencitrakan diri sebagai partai pengusung syariat, selain karena Prabowo efek yang memang digambarkan didukung oleh ijtimia Ulama saat itu. Tren seperti ini menunjukkan keunikan model dukungan dari konstituen Tasikmalaya yang merasa diwadahi atau tidak terwadahi dengan keberadaan PPP dan pencitraan politik yang berkembang.

Tahun 2019 PPP dikalahkan oleh Gerindra yang secara isu pencitraan *handle* mode dukungan terhadap keber-Islaman yang cenderung “kanan” dan dukungan terhadap isu syariat karena didukung oleh Habib Rizieq Cs. Sedangkan PPP saat itu lebih memilih jalur PPP pusat yang mengembangkan Islam moderat dengan berkolaborasi dengan PDIP sebagai partai penguasa yang berideologi nasionalis, tren suaranya justru berkurang, bahkan Pemilu 2019 menjadi sejarah tersendiri jatuhnya PPP sebagai pemuncak raihan kursi baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menarik karena sedikit banyak menunjukkan sebuah tren baru di mana strategi pencitraan dengan memperhatikan pencitraan sebagai partai pendukung Islam politik cenderung disukai dalam kontestasi politik di Tasikmalaya.

C. Analisis terhadap Pencitraan PPP Tasikmalaya

Citra publik merupakan situasi yang salah satunya mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya, disamping itu untuk menguji derajat pengetahuan publik, baik yang akan mempengaruhi aspirasi, sikap, perilaku bahkan imajinasi publik terhadap partai politik (Randall dan Svasand, 2002). Dalam pendekatan *systemness* untuk menjawab pertanyaan mengenai eksistensi PPP di Tasikmalaya, seperti yang telah dijelaskan bahwa pertautan antara kemapanan sistem, baik secara organisasi maupun fungsi-fungsi partai politik pra dan pasca Reformasi, juga faktor struktural mengenai sosio-kultur yang mempengaruhi sosio-politik, di mana identitas dan nuansa ke-Islaman yang kental, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya, maka dalam mencari derajat citra publik ini penulis menemukan pengaruh secara kultural juga merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan besarnya citra publik PPP di Tasikmalaya yang akan menentukan derajat pengetahuan publik bahkan imaji publik terhadap PPP di Tasikmalaya.

Faktor kultural tersebut menjadi pembentuk dan kemudian memapankan ideologi partai ditengah-tengah masyarakat Tasikmalaya. Citra yang terbentuk saling berkelindan antara ke-Islaman dalam dimensi pendidikan (pesantren), ke-Islaman dalam dimensi kultur yakni salah satunya dengan mendekati salah satu Ormas terbesar di Indonesia dan juga di Tasikmalaya yakni Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya. Selain itu juga PPP mendekati para ulama lokal dan melakukan pendekatan terhadap cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang ditaati, dan kemudian mempengaruhi dalam ke-Islaman dalam dimensi politik, yang menentukan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya yang pada akhirnya merancang bangun nilai-nilai politik PPP, baik yang melekat dalam individu dan kemudian menjadi kolektif. Hal tersebut di ataslah relasi-relasi yang terbentuk mengenai citra publik terhadap eksistensi PPP di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Artinya ketika berbicara citra PPP, maka sekaligus berbicara tentang konsepsi ke-Islaman, nilai-nilai religiusitas dan harapan mengenai implementasi nilai-nilai ke-Islaman, baik secara sosiologis maupun politis bahkan formalistis dalam wujud kebijakan pemerintah daerah Tasikmalaya.

Isu-isu, wacana-wacana atau gagasan-gagasan bahkan simbol-simbol politik ke-Islaman merupakan fondasi yang membuat infra-struktur dan supra-struktur PPP di Tasikmalaya kokoh, bahkan menurut Informan Asop Sopiudin, selama PPP masih menggunakan gambar Ka'bah, maka sampai kapanpun masyarakat dan konstituen akan punya harapan besar terhadap cita-cita ke-Islaman dan masih percaya terhadap partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islaman di Tasikmalaya. Gurawan Asop Sopiudin ini bukan tanpa alasan, karena pada kenyataannya banyak kalangan di Tasikmalaya ini sudah terinternalisasi oleh PPP sebagai partai Islam melalui turun-temurun dari orang tuanya. Hal ini boleh jadi menjadi salah satu keunggulan PPP dibanding partai lainnya yang memiliki sejarah panjang perjuangan eksistensi dan partai yang memiliki pengalaman dari mulai tekanan rezim sampai menjadi partai besar di Tasikmalaya seperti sekarang ini.

Dakwah agama juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga citra publik PPP Tasikmalaya, karena dalam konteks eksistensi partai, dakwah mempunyai dua fungsi yakni pertama sebagai media penyampai pesan, ajaran dan kebenaran agama sekaligus sebagai media sosialisasi partai, sehingga dakwah merupakan investasi politik yang mendulang citra positif partai. Dalam ruang-ruang

inilah publik mengenali citra PPP Tasikmalaya sebagai partai yang merepresentasikan umat Islam.

Oleh karena itulah banyak kader PPP yang juga merangkap sebagai pendakwah di Tasikmalaya. Selain juga memang sebagai pemimpin pesantren dan juga Ormas yang senantiasa mengisi berbagai ceramah dan dakwah Islam. Peran dakwah ke-Islaman ini juga dalam gilirannya memberi bayangan partai yang lekat dengan Islam. Bayangan atau imajinasi publik dan konstituen partai ketika berbicara PPP adalah gerbong suara umat Islam, kendaraan perjuangan umat Islam dan rumah besar umat Islam. Inilah gambaran citra publik PPP di Tasikmalaya.

Relasi yang kedua dalam membentuk citra partai juga pengetahuan dan imajinasi publik tentang PPP adalah adanya figur atau ketokohan Ulama, baik ulama yang langsung menjadi politisi yang punya jabatan struktural di PPP maupun ulama yang tidak aktif dalam kepengurusan partai tetapi mempunyai dukungan secara politis kepada PPP. Keberadaan ulama yang ke-Islamannya dalam dimensi pendidikan (pesantren) maupun ke-Islaman dalam dimensi kultur, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang menempatkan ulama sebagai sosok penuh dengan nilai-nilai religiusitas yang harus dipatuhi, *digugu* dan ditiru, maka dalam hal ini ketika ke-kharismaan Ulama tersebut melekat unsur-unsur ataupun atribut-atribut partai, maka dengan sendirinya citra Ulama dengan segala ke-Kharismaan akan melekaat sebagai citra partai yang penuh nuansa religiusitas. Maka selama ruang-ruang kultural akan nilai-nilai ke-Islaman dalam sosio-kultur masyarakat Tasikmalaya masih kuat, ke-kharismaan sosok Ulama masih kental dalam mempengaruhi pikiran publik, maka secara politik kekuatan PPP akan tetap mendominasi, karena secara politik simbol, PPP “mengelola” situasi kebatinan religi masyarakat Tasikmalaya, sehingga isu-isu ke-Islaman menjadi “modal” politik PPP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertahankan dominasi politiknya.

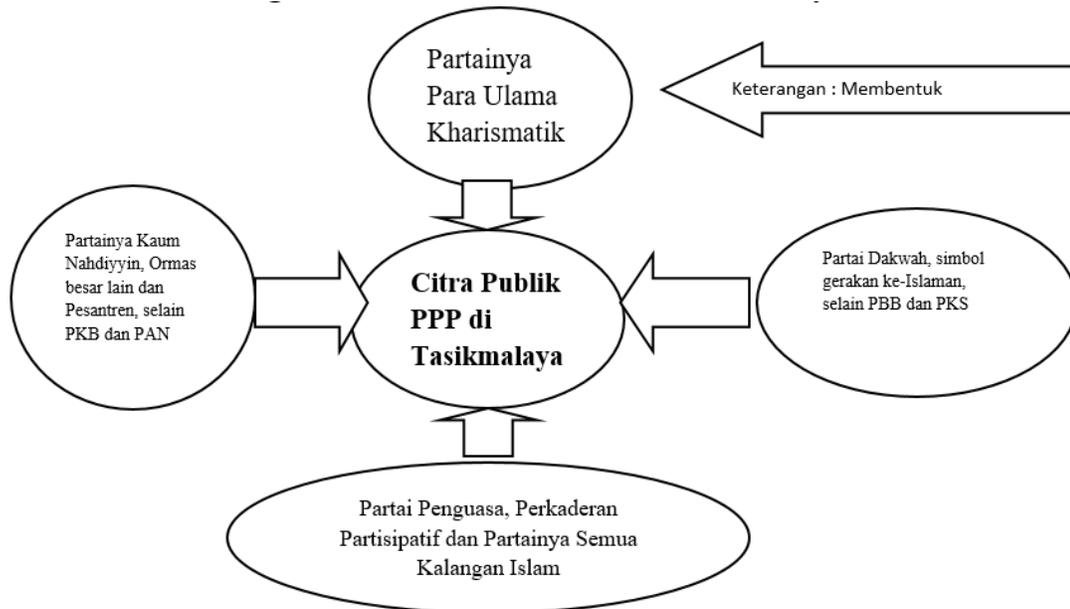
Di Kabupaten Tasikmalaya misalnya sosok KH. Asep Maoshul Affandi merupakan sosok ulama-politisi yang kharismatik dan memiliki massa pendukung sangat banyak. Putra pendiri pesantren Miftahul Huda Manonjaya KH. Choer Affandi ini merupakan anggota DPR-MPR RI dari PPP dan merupakan pengurus DPP PPP yang saat ini salah satu tokoh paku bumi PPP di Tasikmalaya. Ada banyak anggapan yang berkembang bahwa selama figure ini berada dalam wadah PPP, maka pendukung PPP di Tasikmalaya akan bertahan. Hal ini tentunya bukanlah perkiraan semata, namun memiliki alasan yang cukup kuat, karena ketika PPP secara nasional saat ini mengalami “kembang kempis” dalam mempertahankan *parlementary threshold* dan *electoral threshold*, justru PPP Tasikmalaya mampu *survive* dan bertahan mempertahankan kursi parlemen yang relative tinggi dan kursi eksekutif yang selalu dikuasai PPP. Kemenangan Asep Maoshul untuk yang kedua kalinya menduduki kursi parlemen Indonesia juga menjadi bukti kuatnya pengaruh itu.

Dukungan ulama seperti KH. Dede Saiful Anwar (Ponpes Rancapaku Kabupaten Tasikmalaya) terhadap Uu Ruzhanul Ulum juga menjadi salah satu dukungan tersendiri bagi suksesnya Uu-Ade Sugianto Tahap 2 dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2015. Dukungan kompak pesantren yang digalang Dede Saiful Anwar sebagai ketua Perhimpunan Dewan Kemakmuran Masjid ini juga menjadi supporter tersendiri dalam memainkan *image* PPP yang kadernya menjadi calon Bupati saat itu. Belum juga hubungan baik PPP dan elit-elit PPP baik sebagai alumni maupun pengurus pesantren-pesantren besar seperti Sukahideng, Sukamanah, Condong, Cintapada

Subhan Agung¹, Hilal Ramdhani²

Model Pencitraan Politik (*Reification*) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

menempatkan PPP diterima oleh sebagian umat Islam Tasikmalaya dibanding partai yang berbasis Islam lainnya di Tasikmalaya. PPP merupakan partai selain PKB yang mampu mendapat simpatik masyarakat NU Tasikmalaya, partai selain PAN yang mendapat simpatik masyarakat Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya seperti Persis, FPI, Al-Irsyad, PUI juga merasa terepresentasikan oleh PPP di Tasikmalaya. Hal ini yang menjadikan PPP mendapatkan kantong-kantong raihan suara yang relatif tinggi dalam berbagai kontestasi politik di Tasikmalaya. Gambaran umum kondisi reifikasi tersebut secara konseptual dapat digambarkan dalam bagan 5 sebagai berikut:



Gambar 1. Model Citra Publik PPP Tasikmalaya

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa citra publik PPP di Tasikmalaya dibentuk oleh para ulama kharismatik yang memiliki pengaruh di Tasikmalaya, kemudian mendapat dukungan dari kaum Nahdiyyin dan pesantren, pengkaderan yang partisipatif, dan adanya simbol gerakan keislaman.

Secara umum yang terlihat dalam perilaku ke-Islaman masyarakat Tasikmalaya adalah mereka mencerminkan ke-Islaman yang moderat apalagi NU merupakan organisasi dengan massa terbesar di Tasikmalaya yang selalu mendung-dungungkan moderatisasi dalam keber-Islaman. Namun uniknya dapat berubah sangat drastis menjadi massa yang sangat keras, ketika agama merasa dilecehkan atau melihat kemungkaran di depan mata. Maka dapat disebut Ormas seperti Brigade Taliban yang sangat keras dalam melawan segala sesuatu yang dianggapnya kemungkaran.

Dalam konteks keber-Islaman yang seperti itulah kelompok-kelompok tersebut merasa tertampung dan terepresentasi dalam PPP yang relatif “campur aduk” berbagai model keber-Islaman dibanding partai yang memiliki latar belakang Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Platform yang lebih tegas dan sektarian sesuai dengan organisasi induknya seperti membuat “keki” orang-orang tersebut untuk berada di PAN dan PKB, sehingga lebih nyaman dan merasa terwadahi di PPP Tasikmalaya.

Dengan kata lain PPP mampu mendulang suara tinggi di Tasikmalaya karena mampu mencitrakan partai yang berada dibelakang para ulama kharismatik. Ulama

kharismatik di Tasikmalaya memiliki pengaruh dan pendukung setia di Tasikmalaya. Pendukung tetap PPP Tasikmalaya dipastikan berasal dari sumber ini. Bonus pendukung bagi PPP didapatkan dari Ormas-Ormas yang sebenarnya memiliki kedekatan dengan partai lain seperti NU, Muhammadiyah dan Persis. Tapi PPP dapat masuk dan diterima juga oleh Ormas-ormas tersebut dan merebut dukungan dari PKB, PAN atau PKS. Jika PPP mendapat pendukung dari keran-keran tersebut, maka partai lain hanya mendapatkan dukungan dari sumber jaringannya yang terbatas tersebut. Hal inilah yang menjadi jawaban PPP di Tasikmalaya lebih berkembang dibandingkan partai Islam lainnya.

KESIMPULAN

Pembangunan citra PPP diuntungkan dengan kondisi sosio-politik masyarakat Tasikmalaya yang memiliki model budaya ke-Islaman yang unik. Jika ada pembelahan antara Islam fundamental dengan liberal, maka model Tasikmalaya dapat dikatakan tidak masuk dari keduanya. Kultur ke-Islaman yang berlaku di Tasikmalaya lebih mencerminkan ke-Islaman yang taat namun tidak berlebihan. Budaya ke-Islaman tersebut terbentuk dari banyaknya model pembawaan pesantren di Tasikmalaya, dari mulai Salafiyah/tradisional, modern, pesantren yang menggabungkan budaya lokal dengan syariat dan lainnya. Citra publik dibangun untuk melahirkan kesukaan konstituen Tasikmalaya yang melahirkan penyebutan sebagai partai kyai, partai pesantren, partai gerakan/dakwah. Citra ini memiliki pertautan dengan sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene kental dengan kultur ke-Islaman. Model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama kekuatan politik Tasikmalaya, yakni mencitrakan sebagainya partainya Ulama Kharismatik, Partai Nahdiyyin, Partai Ormas dan Partai Dakwah. Diantara keempat pencitraan tersebut yang sangat diandalkan adalah PPP merupakan partai yang didukung kuat oleh para Ulama Kharismatik, dimana dalam konteks Tasikmalaya ulama kharisatik memiliki kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model pencitraan Kharisma Ulama *Mained* sebagai aktor orang kuat dan berpengaruh di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi *leader* dalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.

Penting bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji model pencitraan partai politik di era media sosial, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan fokus pada penggunaan media sosial bagi citra partai politik di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. A. (2016). Pencitraan politik Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2009-2014. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Fahrianoor, F. (2020). Strategi Pencitraan Partai Demokrat Wilayah Kota Banjarmasin Saat Pemilu Tahun 2019. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 5(1), 38-50.

- Goraph, F. A., & Lopak, A. (2018). Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi Kasus di DPC PDIP Kabupaten Halmahera Utara 2014).
- Huntington, PS. (1968). *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven and London.
- Ivanny, J. C. (2023). Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 26-42.
- Kaypama, O. D. (2019). Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(2), 149-159.
- Khatami, M. I. (2021). Eksistensi “Baliho 2024” dalam Pertarungan Elektabilitas: Analisis Pencitraan Tokoh Politik. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 14-24.
- Lutfi, M. (2013). Kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 2(2), 43-52.
- Miles, M.D. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi politik dan pembentukan citra partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147.
- Muhammad, H. A. (2018). Pembangunan Pelembagaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Sebagai Partai Politik Baru di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2(2), 53-70.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurdin, M. (2013). Presidensial Yang Kompromistis (Studi Presidensialisme Reduktif Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono). *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 2(2), 31-36.
- Nurussa'adah, E. (2019). Pencitraan Parpol Islam dalam Surat Kabar. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 3(2).
- Putra, D. K. S. (2019). Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik. *Prenada Media*.
- Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 389-398.
- Randall, V dan Svasand, L. (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London.
- Ridha, M. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 160-182.
- Romli, L., dkk. (2003). *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, P2P-LIPI, Jakarta,
- Salim HS, dkk. (1999). *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, LKiS, Yogyakarta.
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5, 52-61.
- Susanto, A. (2019). Strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019. *JIPP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 123-134.

- Tandjung, A. (2007). *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.
- Tomsa, D. (2008). Party politics and democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era. Routledge.
- Wanto, K. (2021). Pelembagaan Partai Politik (Assesment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang). *Jurnal MoZaiK*, 13(1), 33-46.